

**BUDAYA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN DI WISATA PANTAI PURUS KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji skripsi
Administrasi Publik sebagai salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar sarjana (S1)*



**OLEH :
DINDA AMALIA PUTRI
NIM. 14042071**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam
Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Di Wisata Pantai Purus
Kota Padang

Nama : Dinda Amalia Putri

Nim : 14042071

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Juli 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Aldri Frinaldi, SH., M. Hum., Ph.D
NIP. 19700212 199802 1 001

Drs. Kariuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

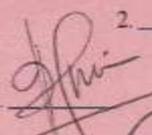
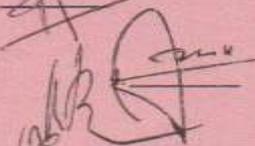
Pada hari Rabu Tanggal 25 Juli 2018 Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB

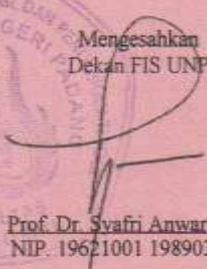
**BUDAYA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI
WISATA PANTAI PURUS KOTA PADANG**

Nama : Dinda Amalia Putri
NIM : 14042071
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Juli 2018

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Aldri Frinaldi., S.H., M.Hum., Ph.D	1. 
Sekretaris : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. _____
Anggota : Prof. Dasman Lanin., M.Pd., Ph.D	3. 
Anggota : Dra. Jumiati, M.Si	4. 
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP M.Si	5. _____

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Svafri Anwar., M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Amalia Putri

TM/NIM : 2014/14042071

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban di Wisata Pantai Purus Kota Padang”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan



Dinda Amalia Putri
2014/14042071

ABSTRAK

DINDA AMALIA PUTRI
14042071

Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban di Wisata Pantai Purus Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus kota Padang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan banyaknya permasalahan terkait budaya kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam hal ini SATPOL PP yang menjadi Bantuan Kendali Operasi (BKO) Pariwisata di wisata Pantai Purus Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, beberapa informan penelitian yaitu Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP, anggota SATPOL PP BKO Pariwisata, wisatawan, petugas parkir, penjaga toilet umum dan pedagang kaki lima (PKL). Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus kota Padang masih belum maksimal. Banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan budaya kerja SATPOL PP yang dikeluhkan oleh masyarakat pariwisata yaitu masalah keberadaan SATPOL PP yang kurang dihargai oleh masyarakat pariwisata dan buruknya komunikasi dari beberapa anggota Satpol PP saat bekerja sehingga kepuasan pengunjung tidak dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis juga memberikan saran kepada pihak yang terkait diantaranya SATPOL PP diharapkan memperbaiki cara komunikasi yang baik sehingga masyarakat pariwisata dapat menghargai SATPOL PP saat bekerja sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban dan terwujudnya kepuasan pengunjung di wisata Pantai Purus kota Padang.

Kata Kunci : Budaya Kerja, Ketentraman dan Ketertiban, Masyarakat Pariwisata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban di Wisata Pantai Purus Kota Padang”**.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku pembimbing II.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Ibu Dra. Jumiati, M.Si, dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Erios Rahman, SH, M.Si Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP kota Padang.
8. Ibu dan Bapak SATPOL PP BKO Pariwisata Kota Padang.
9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Drs. H. Hambali, M.Kes dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Heni Candra Gustina yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Teruntuk kakak tercinta dan tersayang Hajrulidra Pratama, dan Fadel Muhammad dan adek tercinta Adiva Zhafira Aksanni yang selalu memberikan semangat kepada saya. Serta seluruh keluarga selalu memotivasi ananda untuk lebih baik.

11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Juli 2018

Dinda Amalia Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Budaya Organisasi	11
2. Konsep Budaya Kerja	13
3. Konsep Organisasi Perangkat Daerah.....	25
4. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
5. Konsep Ketentraman dan Ketertiban	29
6. Konsep Objek Vital	31
7. Konsep Wisata Pantai.....	32
8. Konsep Kendal	33
9. Konsep Upaya	35
B. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	40

D. Informan Penelitian	41
E. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	79
C. Pembahasan.....	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran.	118
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3 Informan dalam penelitian.....	42
Tabel 4.1 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018.....	77
Tabel 4.2 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	77
Tabel 4.3 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan Pendidikan Tahun 2018.....	77
Tabel 4.4 Daftar Pegawai Tenaga BKO Pariwisata SATPOL PP Kota Padang.....	78
Tabel 4.5 Refleksi Data.....	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4.1 Peta Lokasi Wisata Pantai Purus Kota Padang.....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).....	76
Gambar 4.3 Lokasi pengawasan SATPOL PP di wisata Pantai Purus	81
Gambar 4.4 SATPOL PP melakukan pengawasan terhadap payung ceper di malam hari	82
Gambar 4.5 SATPOL PP sedang bertugas pada peringatan Hari Koperasi ke-71 di Pantai Muaro Lasak.....	82
Gambar 4.6 SATPOL PP bekerja di wisata pada sore hari	88
Gambar 4.7 SATPOL PP wanita menertibkan PKL di wisata.....	91
Gambar 4.8 SATPOL PP menertibkan PKL di tugu PADANG IORA.....	92
Gambar 4.9 <i>Billboard</i> Kawasan Tertib Wisata	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu industri yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta mestimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Pariwisata mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu wisata, pengusaha objek, dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain diluar bidang namun berhubungan dengan bidang pariwisata.

Kondisi yang sangat penting dalam bidang pariwisata adalah keamanan, ketentraman dan ketertiban. Hal tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas pariwisata. Ketentraman dan ketertiban bagi wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu destinasi pariwisata. Faktor ketentraman dan ketertiban pada suatu kawasan pariwisata merupakan nilai tambah dan peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Ancaman ketentraman dan ketertiban wisatawan dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh beragam faktor, seperti konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat sehingga hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya rasa puas bagi para pengunjung wisata.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi alam serta keadaan geografis yang mendukung serta keberagaman budaya yang menjadikan tempat tujuan wisata yang menarik. Pesatnya pertumbuhan bidang pariwisata di Indonesia merupakan tantangan yang cukup kompleks dalam

memberikan rasa nyaman dan rasa aman (*comfort and safety*) bagi wisatawan. Padang merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang menawarkan berbagai obyek dan destinasi wisata terutama wisata Pantai terkhususnya Pantai Purus yang terbagi menjadi beberapa Pantai yaitu Pantai Muaro Lasak dan Pantai Cimpago.

Pantai Purus berlokasi di Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Perkembangan wisata Pantai Purus saat ini masih minim, terutama dari segi ketentraman dan ketertiban, yang sering terjadi akibat ulah dari masyarakat sekitar kawasan wisata. Masih adanya budaya Premanisme yang mengganggu keamanan wisatawan. Dan belum adanya penataan untuk para pedagang (PKL) yang berjualan disekitar kawasan wisata Pantai Muaro Lasak. Ini diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dan penindakan dari SATPOL PP. Dikutip dalam Jurnal Sumbar 02 Juli 2017 Pantai Padang mulai dikuasai PKL.

Berdasarkan observasi awal peneliti Pantai Muaro Lasak yang merupakan bagian dari Pantai Purus, peneliti menemukan bahwa rendahnya budaya kerja SATPOL PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Muaro Lasak terlihat dari tidak adanya SATPOL PP yang bertugas di kawasan wisata Pantai Muaro Lasak ini penulis alami ketika hendak melakukan wawancara dengan beberapa pedagang dan pengunjung wisata (Observasi, 21 Maret 2018).

“SATPOL PP sekarang sudah jarang bertugas di wisata Pantai Muaro Lasak, mereka bertugas kadang sekali-sekali dan hanya memantau, tidak ada lagi yang berjaga di pos pantai.”

Dalam menjalankan ketentraman dan ketertiban di lokasi wisata Pantai Muaro Lasak, SATPOL PP tidak berada ditempat pada jam kerja, SATPOL PP hanya datang pada jam tertentu saja, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran SATPOL PP akan jam kerja. Kurangnya komunikasi SATPOL PP dalam menertibkan PKL di lokasi wisata sehingga kurang indahny penataan lokasi wisata. Hal ini peneliti amati saat Observasi, 24 Maret 2018 dan peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas parkir di Pantai Purus.

“SATPOL PP biasanya ada pagi, dan sore kadang jam 9 pagi, tapi jam mereka datang kadang tidak menentu, tidak menetap, tapi dulu sempat menetap sekarang tidak. PKL yang berada disekitar lokasi wisata kadang ditegur kadang tidak, yang ditegur hanya PKL yang berada disekitar batas tertentu.”

Dan permasalahan lainnya adalah keluhan dari pengunjung wisata yang menunjukkan kurang puasnya dalam pelayanan wisata, contohnya kurang penataan lokasi wisata untuk menjaga kebersihan sarana dan prasarana yang ada seperti masih banyaknya PKL yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga mengurangi keindahan lokasi wisata, dan kurang ramahnya SATPOL PP terhadap pengunjung wisata yang salah parkir, serta dugaan adanya yang melakukan tindakan premanisme sehingga pengunjung kurang nyaman.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menurut

Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan polisi pamong praja Pasal 19 ayat (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional di lapangan, pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bahwa Objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata yang prioritas mendapat pengamanan salah satunya yaitu Kawasan Pantai Padang di Kota Padang dengan pengelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata bahwa Pengelola Obyek Vital Nasional sektor Pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal Obyek Vital Nasional masing-masing.

Menurut Aldri dan Afriva (2017) mengungkapkan kawasan wisata merupakan objek vital nasional karena dikawasan ini selain untuk rekreasi dan juga ramai orang berada di tempat itu termasuk aktivitas perekonomian yang signifikan bagi hajat hidup orang banyak seperti kegiatan jual beli, selain itu

juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 23 ayat (1) *point a* bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Aldri dan Afriva (2017) mengungkapkan bahwa dalam membangun pengembangan atau peningkatan kepariwisataan ini melibatkan banyak komponen termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Untuk hal ketentraman dan ketertiban wisata diperlukan adanya peran dari pihak terkait yaitu salah satunya SATPOL PP sehingga meningkatkan kepuasan pengunjung wisata, dan perlu adanya dukungan untuk menjalankan tugas seperti tersedianya sarana bagi SATPOL PP pada lokasi wisata, Pos Jaga sehingga SATPOL PP dapat menetap dan menjalankan tugasnya dalam ketentraman dan ketertiban, dan pengunjung wisata pun mengetahui kemana akan melapor saat ada insiden.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Padang akan membentuk pos-pos pemantauan di lokasi-lakasi strategis, seperti di sepanjang pantai Padang, pantai Air Manis, Kota Tua Lama dan Muara Padang. Pos pantau ini adalah untuk memudahkan SATPOL PP dalam melaksanakan tugas di lapangan yang nantinya bekerjasama dengan pihak polisi wisata dan Dinas Pariwisata Kota Padang. Dikutip dalam RRI 01 Februari 2016 SATPOL PP Padang bentuk Posko Pemantau.

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat fokus memberantas premanisme dan parkir liar di kawasan pariwisata pantai. Beberapa diantaranya di pantai Muaro, Air Manis, Cimpago dan Muaro Lasak. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang bersama kecamatan Padang Barat khusus di Pantai Cimpago dan Muaro Lasak untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran tersebut di saat intensitas pengunjung tinggi pada hari libur dan akhir pekan, serta Kepolisian, SATPOL PP dan TNI untuk semua wilayah wisata. “Kami juga memiliki pengaman wisata yang setiap saat berkeliling di area wisata,” (Medi Iswandi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang, 26 Januari 2018. Dikutip dalam *Republika* 27 Januari 2018 Padang Fokus Berantas Premanisme di Kawasan Pantai.

Salah satu permasalahan terhambatnya pengembangan wisata yaitu masih terlihat belum sinergisnya secara berkelanjutan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya kawasan wisata pantai melibatkan OPD Pariwisata, OPD Satuan Polisi Pamong Praja, OPD Kebersihan, OPD keselamatan, dan OPD usaha kecil menengah, OPD penanggulangan bencana, dan instansi aparaturnya keamanan maupun instansi pertahanan hal ini dijelaskan dalam penelitian Aldri dan Afriva (2017)

Berdasarkan hasil penelitian Aldri dan Afriva (2017) budaya kerja aparaturnya dan masyarakat pariwisata yang tinggi di Padang adalah Pantai Muaro Lasak dibandingkan dengan Pantai Aie Manih. Namun kelemahan dari Pantai Muaro Lasak pada pengembangan objek wisata masih kurang seperti masih kurangnya pengelolaan sampah yang terlihat dari lingkungan yang

kurang memuaskan pengunjung, serta belum adanya penerapan sistem parkir menggunakan karcis elektronik sehingga bisa mencegah adanya parkir liar, pungutan liar (pungli) maupun pemalakan.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam hal ini SATPOL PP juga menjaga ketentraman dan ketertiban pada lokasi Wisata Pantai Muaro Lasak dalam meningkatkan kepuasan pengunjung wisata. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian yaitu Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Muaro Lasak Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Erios Rahman selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tibum) SATPOL PP kota Padang beliau menjelaskan bahwa SATPOL PP memberikan tenaga BKO (Bantuan Kendali Operasi) ke objek wisata kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Padang untuk mengamankan segala macam objek wisata di kota Padang salah satunya Pantai Purus Padang yang mencakup Pantai Cimpago dan Pantai Muaro Lasak. SATPOL PP yang ditugaskan sebanyak 20 orang untuk mengamankan semua objek wisata kota Padang, jam kerjanya dibagi menjadi dua *shift* dimulai pada jam 7:30-22:00 wib. (Wawancara, 18 Mei 2018).

Berdasarkan uraian diatas kurangnya pengawasan dari SATPOL PP terhadap keamanan wisata di Pantai Muaro Lasak, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja**

(SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak preman-preman (tukang palak) di wisata Pantai Muaro Lasak
2. Kurangnya pengawasan ketentraman dan ketertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
3. Belum sinergisnya koordinasi masing-masing OPD terkait dalam pengembangan wisata
4. Kurangnya kesadaran SATPOL PP terhadap jam kerja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lokasi wisata Pantai Purus
5. Kurangnya komunikasi SATPOL PP terhadap penertiban PKL yang berjualan disekitar kawasan wisata Pantai Purus
6. Kurang ramahnya SATPOL PP terhadap pengunjung wisata yang salah parkir

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi yakni untuk mengetahui Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus Kota Padang

dan apa kendala dan upaya dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus Kota Padang?
2. Apa saja kendala SATPOL PP dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wisata Pantai Purus?
3. Bagaimana upaya SATPOL PP dalam mengatasi kendala dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wisata Pantai Purus?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus Kota Padang
2. Mendeskripsikan kendala SATPOL PP dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wisata Pantai Purus
3. Mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam mengatasi kendala untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban pada wisata Pantai Purus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, khususnya Budaya Organisasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

- a) Pemerintah, agar menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam membangun budaya kerja untuk menciptakan ketraman dan ketertiban di wisata Pantai Purus
- b) Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat berwisata dengan aman sehingga meningkatkan kepuasan terhadap pengunjung wisata.